

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Teori Strukturasi Anthony Giddens

Menurut Giddens dalam Cohen (1989 hal 2-3) Teori Strukturasi memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bahwa kehidupan sosial dibentuk dengan praktik sosial, yang artinya tindakan dan interaksi manusia yang selalu terikat pada ruang dan waktu. Dalam kerangka ini, Struktur (aturan, norma) serta agensi (tindakan manusia) dipandang sebagai entitas yang saling membentuk sehingga praktik sosial selalu lahir dari dinamika diantara keduanya. Strukturasi merupakan konsep sosiologi yang disampaikan oleh Anthony Giddens sebagai kritik kepada teori *fungsiionalisme* dan *evolusionisme*. Inti dari teori ini terlihat pada empat konsep utama yaitu struktur, agensi, dualitas struktur dan praktik sosial (Nashir, 2010).

Teori strukturasi dalam penelitian ini berkaitan pada bagaimana struktur (aturan, norma) dan agensi (kesadaran masyarakat) saling mempengaruhi dalam praktik sosial. Struktur mendukung kerangka, aturan, dan sumber daya yang akan menunjang Program Kampung Iklim. Akan tetapi, keberlanjutan partisipasi masyarakat tidak bergantung pada dukungan struktur, melainkan bagaimana masyarakat menafsirkan, merespons dan bahkan berinovasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, teori ini dapat membantu menganalisis interaksi antara kebijakan dan kesadaran masyarakat, sehingga nantinya akan terlihat bagaimana partisipasi dalam Proklim dapat bertahan dan berkelanjutan.

2.1.1.1. Struktur

Menurut Giddens (1984, hlm 25-36) struktur mencakup seperangkat aturan, norma, dan sumber daya yang menjadi arah bagi tindakan sosial, struktur tidak bersifat kaku melainkan bersifat dinamis, struktur menyediakan batas dan peluang bagi tindakan, tetapi tidak sepenuhnya menentukan perilaku individu. Struktur terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Struktur signifikasi berkaitan dengan pemaknaan dan simbol yang memungkinkan terjadinya komunikasi sosial. Melalui bahasa, pengetahuan, dan simbol, individu

menafsirkan realitas sosial dan membangun pemahaman bersama. Struktur dominasi berhubungan dengan penggunaan sumber daya, baik material maupun non material, yang memungkinkan adanya kekuasaan dan pengaruh antar individu atau kelompok. Sedangkan struktur legitimasi mencakup norma dan nilai yang memberikan dasar moral serta aturan bagi perilaku sosial.

a. Legitimasi

Dalam teori strukturasi, legitimasi merupakan salah satu dimensi utama struktur yang berkaitan dengan norma, nilai, serta aturan yang memberikan dasar moral dan justifikasi sosial terhadap tindakan individu maupun kolektif. Menurut Anthony Giddens (1984, hlm 33-36), struktur legitimasi bekerja melalui skema normatif yang mengatur apa yang dianggap pantas, benar, atau dapat diterima dalam kehidupan sosial. Norma dan nilai tersebut tidak hanya membatasi tindakan, tetapi juga memungkinkan aktor sosial bertindak secara terarah karena adanya kepastian mengenai konsekuensi sosial dari suatu tindakan. Dengan demikian, legitimasi berfungsi sebagai landasan normatif yang menopang keteraturan sosial.

Lebih lanjut, Giddens (1984, hlm 35) menjelaskan bahwa legitimasi beroperasi melalui mekanisme sanksi, baik yang bersifat formal maupun informal. Sanksi tersebut dapat berupa penghargaan sosial, pengakuan, maupun hukuman sosial yang memperkuat kepatuhan terhadap norma. Sistem sosial bertahan karena adanya nilai yang dilembagakan dan melihat norma sebagai penopang stabilitas sistem, Giddens menekankan bahwa legitimasi terus direproduksi dan dapat berubah melalui praktik sosial aktor. Akan tetapi, legitimasi tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial dan internalisasi nilai. Paulo Freire, (1970, hlm 74-76) menegaskan bahwa kesadaran kritis (*conscientization*) memungkinkan masyarakat memahami alasan di balik suatu aturan dan nilai, sehingga kepatuhan tidak lagi bersifat koersif, melainkan reflektif. Proses yang dialogis berperan dalam membangun legitimasi melalui pemahaman bersama, bukan sekadar instruksi dari otoritas. Dengan demikian, legitimasi menjadi lebih kokoh karena berakar pada kesadaran kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, legitimasi dalam kerangka strukturasi dapat dipahami sebagai dimensi normatif yang menopang praktik sosial melalui aturan, nilai, dan sanksi yang diakui secara sosial. Legitimasi tidak bersifat statis, melainkan terus direproduksi dan dinegosiasikan melalui tindakan dan interaksi masyarakat. Dalam konteks program pembangunan berbasis komunitas, legitimasi yang kuat tercermin dari sejauh mana norma dan aturan program dipahami, diterima, serta dijalankan secara sukarela oleh masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi menjadi sub-indikator penting dalam menganalisis struktur, khususnya untuk melihat bagaimana norma dan nilai sosial memengaruhi keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam praktik sosial.

b. Dominasi

Dalam teori strukturasi, dominasi merupakan dimensi struktur yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya yang memungkinkan aktor sosial menjalankan kekuasaan dan pengaruh dalam relasi sosial. Menurut Giddens (1984, hlm 31-34), struktur dominasi bekerja melalui kontrol atas sumber daya yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alokatif (material, ekonomi, teknologi) dan sumber daya otoritatif (kemampuan mengorganisasi dan mengarahkan manusia). Melalui penguasaan sumber daya tersebut, aktor atau kelompok tertentu memiliki kapasitas lebih besar untuk memengaruhi keputusan dan tindakan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Giddens menegaskan bahwa dominasi tidak selalu bermakna penindasan, melainkan menunjukkan bagaimana relasi kekuasaan dilembagakan dalam praktik sosial sehari-hari (Giddens, 1984, hlm 31-34). Kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif, yakni kemampuan aktor untuk menghasilkan perbedaan dalam alur kejadian sosial. Dengan demikian, dominasi tidak berdiri terpisah dari tindakan, tetapi hadir dan direproduksi melalui interaksi sosial yang berulang. Struktur dominasi menjadi medium yang memungkinkan tindakan kolektif berjalan, sekaligus hasil dari praktik sosial yang terus dilakukan oleh para aktor.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Jim Ife dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Ife & Tesoriero (2006, hlm 56-59) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam komunitas sering kali terpusat pada pihak-pihak yang memiliki

akses lebih besar terhadap sumber daya, informasi, dan jaringan sosial. Dalam konteks ini, dominasi dapat menjadi penghambat partisipasi apabila sumber daya hanya dikuasai oleh elite lokal atau aktor eksternal. Namun, dominasi juga dapat ditransformasikan menjadi kekuatan kolektif apabila terjadi distribusi sumber daya yang lebih adil dan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah upaya mendekonstruksi relasi dominasi yang timpang.

Berdasarkan hal tersebut, dominasi dalam kerangka strukturasi dapat dipahami sebagai dimensi struktur yang mengatur relasi kekuasaan melalui penguasaan sumber daya material dan non material. Dominasi tidak bersifat statis atau sepenuhnya menindas, melainkan dapat direproduksi atau ditransformasikan melalui praktik sosial. Dalam konteks pembangunan dan pendidikan masyarakat, analisis dominasi menjadi penting untuk melihat bagaimana distribusi sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan memengaruhi partisipasi serta keberlanjutan praktik sosial. Dengan demikian, dominasi sebagai sub indikator struktur membantu menjelaskan apakah praktik sosial dalam komunitas berjalan secara inklusif atau justru mereproduksi ketimpangan kekuasaan.

c. Signifikasi

Dalam teori strukturasi, signifikasi merupakan dimensi struktur yang berkaitan dengan proses pemaknaan dan simbolisasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi sosial. Menurut Giddens (1984, hlm 28-31), struktur signifikasi bekerja melalui skema interpretatif yang digunakan aktor untuk memahami tindakan, peristiwa, dan realitas sosial. Bahasa, simbol, dan pengetahuan bersama menjadi alat utama dalam proses ini. Dengan demikian, tindakan sosial hanya dapat dipahami dan dijalankan secara bermakna apabila aktor memiliki kerangka interpretasi yang relatif sama terhadap situasi sosial yang dihadapi.

Giddens menegaskan bahwa makna tidak melekat secara alamiah pada tindakan, melainkan dihasilkan melalui interaksi sosial yang berulang. Proses signifikasi ini bersifat dinamis karena makna dapat berubah seiring dengan perubahan konteks ruang dan waktu. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran

Berger & Thomas (1966, hlm 51-55) dalam *The Social Construction of Reality* yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses internalisasi makna yang dikonstruksikan secara sosial. Dengan kata lain, struktur signifikasi berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap suatu program, kebijakan, atau praktik sosial.

Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, signifikasi menentukan bagaimana masyarakat menafsirkan tujuan, manfaat, dan relevansi suatu intervensi sosial. Ife & Tesoriero (2006, hlm 72-75) menekankan bahwa kegagalan program komunitas sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, melainkan oleh perbedaan makna antara perancang program dan masyarakat. Ketika masyarakat tidak memaknai program sebagai kebutuhan bersama, partisipasi cenderung bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, proses dialog dan komunikasi partisipatif menjadi kunci dalam membangun signifikasi yang dimaknai bersama. Signifikasi berkaitan erat dengan proses pembelajaran sosial dan kesadaran kritis. Freire (1970 hlm, 87-91) menegaskan bahwa pendidikan yang dialogis memungkinkan masyarakat merefleksikan realitasnya sendiri dan memberi makna baru terhadap pengalaman hidup mereka. Pendidikan yang bersifat satu arah justru berpotensi melanggengkan makna yang dipaksakan oleh pihak dominan.

Dengan demikian, signifikasi dalam kerangka strukturasi dapat dipahami sebagai dimensi struktur yang mengatur produksi dan reproduksi makna dalam praktik sosial. Signifikasi tidak bersifat netral, melainkan terbentuk melalui interaksi, dialog, dan proses pembelajaran sosial. Dalam konteks pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, signifikasi menjadi sub indikator penting untuk melihat bagaimana masyarakat memahami tujuan dan nilai suatu praktik sosial. Pemaknaan yang selaras dan reflektif akan memperkuat partisipasi dan keberlanjutan, sedangkan perbedaan makna berpotensi melemahkan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

2.1.1.2 Agensi

Sementara itu, agensi dalam teori strukturasi merujuk pada kemampuan aktor sosial untuk bertindak secara reflektif dan memiliki kesadaran atas

tindakannya. Menurut Giddens (1984 hlm 3-5) setiap individu memiliki kapasitas untuk bertindak yang dapat memengaruhi keadaan sosial. Dalam pandangan ini, agen tidak sekadar mengikuti aturan sosial, tetapi juga mampu menafsirkan melalui tindakan yang sadar. Oleh karena itu setiap tindakan juga merupakan reproduksi dalam konteks pelaksanaan kehidupan sosial sehari-hari (Hidayat dalam Ashaf, 2006). Oleh karena itu dalam ProKlim agensi masyarakat terlihat ketika mereka mampu mengembangkan inisiatif lokal, beradaptasi dengan kebijakan, serta menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Menurut Giddens (1984) dalam (Mizan, 2016) mengemukakan bahwa dalam teori strukturasi, agensi memiliki dua tingkat kesadaran yaitu kesadaran praktis dan kesadaran diskursif.

a. Kesadaran Praktis

Dalam teori strukturasi, kesadaran praktis merupakan salah satu bentuk kesadaran aktor yang melekat dalam tindakan sehari-hari. Menurut Giddens (1984 hlm 7-9), kesadaran praktis adalah pengetahuan yang dimiliki individu tentang “bagaimana bertindak” dalam situasi sosial tertentu, tetapi tidak selalu dapat diungkapkan secara verbal. Kesadaran ini tampak dalam rutinitas, kebiasaan, dan pola tindakan yang dilakukan secara berulang tanpa refleksi eksplisit. Melalui kesadaran praktis inilah praktik sosial berlangsung secara stabil dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Giddens menegaskan bahwa sebagian besar tindakan sosial justru digerakkan oleh kesadaran praktis, bukan oleh kesadaran diskursif. Aktor tidak setiap saat merefleksikan atau menjelaskan alasan tindakannya, tetapi tetap bertindak secara bermakna berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang telah terinternalisasi. Dalam konteks ini, kesadaran praktis menjadi mekanisme utama reproduksi struktur, karena melalui tindakan rutin tersebut aturan dan norma sosial terus dijalankan dan diperbarui. Dengan demikian, kesadaran praktis menunjukkan bahwa agensi tidak selalu bersifat reflektif secara eksplisit, tetapi tetap memiliki dampak struktural.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Berger & Thomas (1966, hlm 71-75) dalam *The Social Construction of Reality* yang menjelaskan bahwa kebiasaan (*habitualization*) merupakan dasar terbentuknya institusionalisasi sosial. Tindakan yang dilakukan berulang kali akan diterima sebagai sesuatu yang “wajar” dan

“biasa”, sehingga tidak lagi dipertanyakan. Dalam konteks ini, kesadaran praktis berperan sebagai jembatan antara pengalaman individual dan keteraturan sosial yang tampak objektif. Kesadaran praktis berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjalankan tindakan kolektif secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada aktor eksternal. Ife & Tesoriero (2006, hlm 64-67) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak selalu ditandai oleh kemampuan masyarakat menjelaskan konsep pembangunan secara teoritis, melainkan oleh kebiasaan bertindak yang mencerminkan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Ketika masyarakat mampu melakukan praktik-praktik sosial secara rutin seperti pengelolaan lingkungan, kerja kolektif, atau pengambilan keputusan lokal hal tersebut menunjukkan tumbuhnya agensi yang berbasis pada kesadaran praktis.

Berdasarkan hal tersebut, kesadaran praktis dapat dipahami sebagai bentuk agensi yang terwujud dalam kebiasaan dan rutinitas tindakan sosial. Kesadaran ini tidak selalu tampak dalam wacana atau penjelasan verbal, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan praktik sosial. Dalam kerangka strukturasi, kesadaran praktis menunjukkan bagaimana aktor secara aktif mereproduksi struktur melalui tindakan sehari-hari. Oleh karena itu, kesadaran praktis sebagai sub-indikator agensi menjadi kunci analisis untuk memahami keberlanjutan partisipasi masyarakat yang tidak bergantung pada instruksi formal, melainkan pada kebiasaan sosial yang telah mengakar.

b. Kesadaran Diskursif

Dalam teori strukturasi, kesadaran diskursif merupakan bentuk kesadaran aktor yang memungkinkan individu menjelaskan, merefleksikan, dan mengartikulasikan alasan atas tindakan yang mereka lakukan. Menurut (Giddens, 1984, hlm 5-8), kesadaran diskursif merujuk pada kapasitas aktor untuk memberikan penjelasan verbal mengenai motif, tujuan, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi tindakannya. Berbeda dengan kesadaran praktis yang bersifat implisit, kesadaran diskursif bersifat reflektif dan eksplisit. Dalam kerangka ini, agensi tidak hanya tampak pada tindakan, tetapi juga pada kemampuan aktor memahami dan mengkomunikasikan makna dari tindakannya sendiri. Giddens menegaskan bahwa reflektivitas merupakan ciri utama modernitas, di mana

individu secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi tindakannya dalam konteks sosial (Giddens, 1984, hlm 3-4). Kesadaran diskursif memungkinkan aktor menilai apakah tindakannya selaras dengan norma, tujuan kolektif, atau kepentingan tertentu. Dengan demikian, kesadaran diskursif memperkuat dimensi agensi karena aktor tidak sekadar menjalankan rutinitas, tetapi juga memiliki kemampuan kritis untuk mempertimbangkan alternatif tindakan. Dalam proses ini, tindakan sosial menjadi lebih sadar, terarah, dan berpotensi transformatif.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kesadaran diskursif berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, serta merumuskan solusi secara kolektif. Ife & Tesoriero (2006, hlm, 83-86) menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya soal tindakan partisipatif, tetapi juga tentang kemampuan komunitas untuk memahami struktur yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika masyarakat mampu mengartikulasikan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi secara sadar, maka proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan demokratis. Kesadaran diskursif dalam hal ini menjadi fondasi bagi penguatan posisi tawar masyarakat dalam relasi sosial.

Kesadaran diskursif memiliki keterkaitan kuat dengan konsep kesadaran kritis (*critical consciousness*). Freire (1970, hlm 109-112) menyatakan bahwa proses pendidikan yang dialogis memungkinkan individu menyadari struktur sosial yang membentuk kehidupannya dan secara aktif merefleksikan realitas tersebut. Sejalan dengan itu, (Sudjana, 2004, hlm 62-65) menjelaskan bahwa pendidikan masyarakat bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir reflektif dan partisipatif, sehingga warga tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan, tetapi juga subjek yang mampu menilai dan mengembangkan program secara mandiri. Dengan demikian, kesadaran diskursif menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana agensi masyarakat berkembang secara reflektif dan kritis.

Berdasarkan uraian tersebut, kesadaran diskursif dapat dipahami sebagai kapasitas reflektif aktor dalam menjelaskan dan mengevaluasi tindakannya dalam konteks sosial. Dalam kerangka strukturasi, kesadaran ini memperkuat agensi karena memungkinkan aktor tidak hanya mereproduksi struktur, tetapi juga berpotensi mentransformasikannya. Oleh karena itu, kesadaran diskursif sebagai

sub-indikator agensi menjadi elemen penting dalam menganalisis partisipasi masyarakat, khususnya untuk melihat apakah keterlibatan yang terjadi bersifat sadar, reflektif, dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan.

2.1.1.3. Dualitas Struktur

Hubungan antara struktur dan agensi dijelaskan oleh (Giddens, 1984 hlm 25-26) melalui konsep “*duality of structure*” yaitu gagasan bahwa struktur dan tindakan bukanlah dua entitas yang terpisah (*dualism*), melainkan saling membentuk dan memperkuat (*duality*). Pandangan ini diperkuat oleh Cohen (1989 hlm 21-25) yang menjelaskan bahwa konsep *duality of structure* merupakan inti logis dan ontologis dari teori strukturasi, menekankan bahwa Giddens berupaya menggabungkan sudut pandang klasik antara *subjektivisme* dan *objektivisme* dalam ilmu sosial. Struktur tidak hanya mengatur perilaku aktor sosial, tetapi juga muncul dari tindakan reflektif.

Dalam kerangka dualitas struktur, setiap tindakan sosial selalu merujuk pada aturan dan sumber daya yang telah ada, namun pada saat yang sama tindakan tersebut juga memperbarui dan membentuk kembali struktur tersebut (Giddens, 1984, hlm 2-4). Dengan demikian, struktur bersifat *enabling* (memungkinkan) sekaligus *constraining* (membatasi). Pandangan ini menjadi kritik terhadap pendekatan strukturalisme yang terlalu menekankan determinasi sistem, serta terhadap volunterisme yang terlalu menekankan kebebasan individu. Dualitas struktur menunjukkan bahwa keberlangsungan kehidupan sosial terjadi karena adanya relasi dinamis antara aturan yang dilembagakan dan kapasitas reflektif aktor.

Pemahaman ini memiliki keterkaitan dengan perspektif konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger & Thomas (1966, hlm 78-82) yang menjelaskan bahwa masyarakat adalah produk manusia sekaligus manusia adalah produk masyarakat. Realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung terus-menerus. Sejalan dengan dualitas struktur, individu tidak hanya dibentuk oleh sistem sosial, tetapi juga secara aktif membentuk dan mengubahnya melalui tindakan yang bermakna.

Dualitas struktur menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak dapat terjadi hanya melalui intervensi struktural dari luar, melainkan harus melibatkan agensi masyarakat itu sendiri. Ife & Tesoriero, (2006, hlm 91-94) menegaskan bahwa pembangunan berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang mampu memengaruhi struktur sosial di sekitarnya. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dan mengelola sumber daya, mereka tidak hanya menjalankan program, tetapi juga membentuk ulang pola relasi sosial dan distribusi kekuasaan. Dalam konteks ini, dualitas struktur terlihat pada bagaimana aturan program dijalankan sekaligus dimodifikasi sesuai kebutuhan lokal.

Dari sudut pandang pendidikan masyarakat, dualitas struktur memiliki relevansi dengan proses pembelajaran yang bersifat transformatif. Freire (1970, hlm 126-129) menekankan bahwa praksis kesatuan refleksi dan tindakan memungkinkan individu mengubah realitas sosial yang menindas. Individu bukan sekadar objek struktur, tetapi subjek historis yang mampu merekonstruksi tatanan sosial melalui kesadaran kritis. Sejalan dengan itu, Sudjana (2004, hlm 70-73) menyatakan bahwa pendidikan masyarakat bertujuan membentuk warga yang partisipatif dan mandiri, sehingga mampu berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut, dualitas struktur dapat dipahami sebagai relasi timbal balik antara struktur dan agensi dalam praktik sosial. Struktur menyediakan kerangka aturan dan sumber daya, sementara agensi memungkinkan reproduksi maupun transformasi struktur melalui tindakan reflektif. Konsep ini menjadi landasan analitis untuk memahami bagaimana praktik sosial dapat berlanjut atau berubah dalam suatu komunitas. Dengan demikian, dualitas struktur tidak hanya menjelaskan keteraturan sosial, tetapi juga membuka ruang bagi perubahan melalui partisipasi, refleksi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.1.4. Praktik Sosial

Dalam teori strukturasi, praktik sosial merupakan hasil dari hubungan antara struktur dan agensi yang berlangsung secara dinamis. Menurut Giddens (1984 hlm 2-4) praktik sosial sebagai tindakan-tindakan berulang yang dilakukan manusia dalam konteks ruang dan waktu tertentu, di mana melalui tindakan tersebut struktur

sosial terus direproduksi dan dimaknai ulang. Hal ini diperkuat dengan pandangan dari (Cohen, 1989 hlm 105-107) yang menjelaskan bahwa praktik sosial adalah bentuk konkret dari *recursiveness of social practices*, yaitu proses berulang di mana tindakan manusia tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi juga membentuk kembali struktur sosial melalui interpretasi, adaptasi, dan inovasi.

Giddens (1984, hlm 19-21) menegaskan bahwa keberlangsungan masyarakat bergantung pada sifat rekursif (*recursiveness*) dari praktik sosial, yaitu proses di mana tindakan yang sama terus diulang sehingga menciptakan keteraturan sosial. Namun, pengulangan tersebut tidak bersifat mekanis, karena setiap tindakan tetap melibatkan kapasitas reflektif aktor. Oleh karena itu, praktik sosial selalu mengandung potensi perubahan. Ketika aktor memodifikasi cara bertindak atau menafsirkan ulang aturan yang ada, maka struktur pun dapat mengalami transformasi. Dalam konteks ini, praktik sosial bukan hanya rutinitas, tetapi juga ruang reproduksi dan inovasi sosial.

Pemahaman ini memiliki kesesuaian dengan perspektif konstruksi sosial dari Berger & Thomas (1966, hlm 70-75), yang menjelaskan bahwa institusi sosial terbentuk dari kebiasaan yang dilembagakan melalui tindakan berulang. Ketika suatu tindakan dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai sesuatu yang wajar, tindakan tersebut menjadi bagian dari realitas sosial yang objektif. Dengan demikian, praktik sosial menjadi mekanisme utama dalam membentuk dan mempertahankan keteraturan masyarakat. Praktik sosial mencerminkan tingkat internalisasi nilai, norma, dan tujuan kolektif dalam kehidupan sehari-hari. Ife & Tesoriero (2006, hlm 101-104) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan komunitas tidak hanya diukur dari adanya kebijakan atau program formal, tetapi dari sejauh mana praktik tersebut menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat. Ketika nilai partisipasi, gotong royong, dan tanggung jawab lingkungan telah terwujud dalam tindakan rutin, maka pembangunan telah bertransformasi menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, praktik sosial dapat dipahami sebagai wujud konkret dari relasi antara struktur dan agensi yang berlangsung secara berulang dan bermakna. Praktik sosial bukan sekadar tindakan individual, melainkan pola kolektif yang

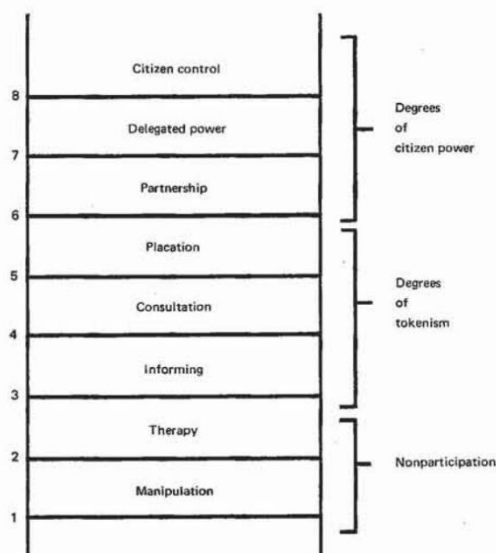
membentuk dan dibentuk oleh aturan, sumber daya, serta kesadaran masyarakat. Dalam konteks pembangunan dan pendidikan masyarakat, praktik sosial menjadi indikator utama keberlanjutan, karena melalui praktik yang konsisten dan reflektif, nilai dan tujuan bersama dapat direproduksi serta ditransformasikan sesuai kebutuhan komunitas.

2.1.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat yang Berkelanjutan

Partisipasi masyarakat menjadi bagian yang penting dalam proses berjalannya keberlanjutan Program Kampung Iklim. Menurut Sastropoetro (1988 hlm 45) bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan dibersamai dengan kesadaran dan tanggung jawab kepada kepentingan kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi Masyarakat merupakan proses komunikasi dua arah yang secara terus menerus dilakukan secara konsisten (Laily, 2015). Menurut Soetrisno (1995) dalam (Nabila & Yuningsih, 2019) terdapat dua definisi dalam partisipasi masyarakat yang berkembang. Pertama, partisipasi sebagai dukungan rakyat kepada pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, yang dapat diukur dengan kesediaan menanggung biaya berupa uang maupun tenaga. Kedua partisipasi dilihat sebagai kerja sama antara perencana dengan masyarakat yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasilnya. Pada definisi ini diartikan bahwa tingkat partisipasi tidak dapat diukur dari kontribusi menyumbang biaya, akan tetapi masyarakat terlibat dalam menentukan kebutuhan mereka sendiri dan mengembangkan hasil yang sudah dicapai.

Hal ini sejalan dengan model *A Ladder of Citizen Participation* oleh Arnstein (1969) yang menggambarkan derajat partisipasi dengan membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan utama yaitu *Non-Participation (Manipulation dan Therapy)* yang artinya masyarakat menjadi objek belaka dari suatu kebijakan atau program dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dalam program, pada tahap ini partisipasi dilakukan bersifat simbolik di mana bertujuan untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan kepentingan beberapa pihak pemangku kebijakan.

Selanjutnya, pada tingkat *Tokenism* (*Informing, Consultation, dan Placation*) dalam artian bahwa masyarakat mulai dilibatkan tetapi hanya formalitas dengan peran yang terbatas dan hanya dilibatkan dalam kegiatan seremonial. Sementara itu, *Citizen Power* (*Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control*) menggambarkan keadaan masyarakat yang memiliki kekuatan yang dapat mengendalikan suatu program atau kebijakan, pada tingkatan ini juga masyarakat dapat memiliki kekuasaan secara langsung dalam menentukan tujuan dan hasil dari suatu program.



Gambar 2. 1. Tingkat Partisipasi Arnstein, 1969
Sumber: (Arnstein, 1969)

Selanjutnya ini diperkuat Mina et al. (2024) bahwa partisipasi masyarakat berkelanjutan melibatkan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan nyata. Partisipasi ini ditandai oleh adanya pemberdayaan, kepemimpinan, kerja sama dan integrasi nilai budaya lokal. Selain itu partisipasi berkelanjutan menegaskan pemahaman terhadap ekologis, praktik sosial yang berkelanjutan, agar dapat berjalan dengan efektif, partisipasi ini memerlukan pencerdasan, pemantauan dan pelaporan yang konsisten, sehingga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap Program Kampung Iklim. Hal tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar ruang masyarakat menentukan kebijakan dan memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian ini menjadi relevan ketika membahas partisipasi Program Kampung Iklim yang mana keberhasilan program

sangat di pengaruhi oleh seberapa besar kesadaran, partisipasi dan pengambilan keputusan masyarakat.

2.1.3 Program Kampung Iklim (ProKlim)

Berdasarkan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim, 2016) menyatakan bahwa Program Kampung Iklim menjadi inisiatif yang dibangun oleh pemerintah dalam perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Dalam undang undang ini juga merincikan bagaimana partisipasi masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian, pemberdayaan dan pengelolaan lingkungan.

Program Kampung Iklim bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan terhadap perubahan iklim dengan strategi mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Menurut Muttaqin et al. (2019) ketahanan masyarakat tidak hanya kesiapan infrastruktur saja tapi juga pada pengetahuan masyarakat dan kemampuan beradaptasi pada keberlanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus selaras dengan prinsip berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Sulistyowati et al. (2024) mengemukakan bahwa praktik ramah lingkungan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan ekologis, dengan demikian agenda pembangunan berkelanjutan tidak sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pada keseimbangan ekologi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Program Kampung Iklim diperlukan mekanisme mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Zulkifli (2022) menegaskan bahwa pelibatan pemangku kepentingan mengenai perencanaan hingga pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa kepemilikan program. Selain itu perlu ada mekanisme yang efektif mengenai monitoring dan evaluasi program sehingga nantinya akan menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Program Kampung Iklim yang berkelanjutan.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Sebagai upaya dalam memperkuat penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa referensi yang relevan serta dapat dijadikan sebagai pembanding dan acuan. Diantara-Nya sebagai berikut:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoiruumah et al. (2024) berjudul *“Partisipasi Perempuan dalam Program Kampung Iklim”* dengan menggunakan penelitian kualitatif, ditemukan bahwa perempuan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Dusun Palasari. Partisipasi tersebut mencakup keempat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani & Resnawaty (2021) berjudul *“Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim Di Kabupaten Cilacap”* menekankan bahwa esensi ProKlim seharusnya menekankan kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji secara mendalam dalam Program Kampung Iklim.

Penelitian yang dilakukan oleh Kharima et al. (2025) berjudul *“Partisipasi Masyarakat RW 04 Kelurahan Pagesangan Kota Surabaya Melalui Program Kampung Iklim”* menunjukkan bahwa keberhasilan Program Kampung Iklim sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan masyarakat terlihat pada semua tahap program, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2023) berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Iklim (Proklm)”* menjelaskan bahwa hasil penelitian ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Kampung Iklim pada Kelurahan Umba Sari masih belum dapat berjalan secara maksimal, disebabkan oleh berbagai hal yang membuat masyarakat kurang dalam berpartisipasi serta berbagai hambatan.

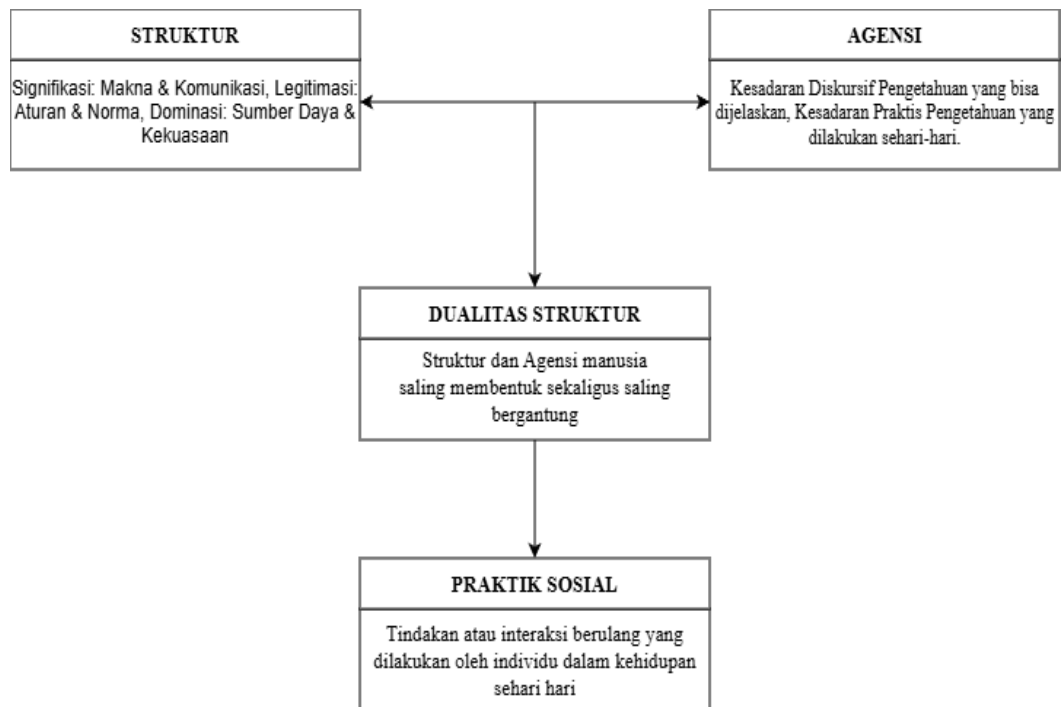
Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan et al. (2024) berjudul *“Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di*

Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang” menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pertamina Patra Niaga, yang berperan dalam mendukung jalannya program tersebut.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir dalam penelitian dapat digambarkan sebagai sebuah peta konsep yang berfungsi sebagai panduan terstruktur bagi peneliti dalam proses penelitian tujuannya untuk mudah memahami keterkaitan antara konsep yang dikaji (Heni Listiana, 2022). Kerangka konseptual penelitian ini melihat pada teori Strukturasi Anthony Giddens yang menyatakan bahwa struktur sebagai aturan dan norma, sementara agensi sebagai individu atau masyarakat yang memiliki kapasitas untuk bertindak dalam mengambil keputusan. Giddens mengemukakan bahwa *duality of structure* yaitu struktur yang tidak membatasi tetapi menjadi hasil dari tindakan masyarakat. Dengan demikian, praktik sosial menjadi hasil dari interaksi antara struktur dan agensi yang dilakukan praktiknya secara berulang ulang (Chatterjee et al., 2019).

Adapun alur kerangka konseptual dalam penelitian ini dengan judul Analisis Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Strukturasi Anthony Giddens. Pertama adalah tahap *input* yang di dalamnya ada dua dimensi utama dalam teori strukturasi Anthony Giddens, yaitu Struktur mencakup pada aturan, norma, dan peran pemerintah dalam mendukung Program Kampung Iklim. Sementara di sisi lain, agensi mencakup tingkat kesadaran dan partisipasi nyata dalam program. Kedua adalah tahap proses yang mendeskripsikan interaksi antara struktur sebagai pemberi dukungan dan agensi dalam mewujudkan tindakan. Ketiga tahap *output* yang dihasilkan dari interaksi ini adalah berbagai praktik sosial dalam Program Kampung Iklim yang dapat dilakukan secara berkelanjutan pada tingkat lokal. Kemudian tahap akhir yaitu *outcome*, yakni terbentuknya partisipasi masyarakat yang berkelanjutan, dengan indikator peningkatan kapasitas lokal dan keberlanjutannya partisipasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Adapun kerangka berpikir tersebut dapat divisualisasikan pada gambar berikut:



Gambar 2. 2. Kerangka Konseptual diadaptasi dari Teori Strukturasi Anthony Giddens 1986
Sumber: Peneliti, 2025